

IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA HARUS KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Humaidi¹, Jumaidi², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: maidinazar2469@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka pemenuhan kesehatan masyarakat berbagai program telah dilaksanakan pemerintah salah satunya melalui program STBM namun pada desa Harus pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui tentang implemetasi program STBM Pilar 1 tentang stop buang air besar sembarangan di desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah dan faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kurang Baik. Dapat dilihat dari 7 indikator yang kurang baik sebagai berikut: *Pertama*, Kejelasan Tujuan Kebijakan yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai isi standar kebijakan tentang gerakan STOP BAB Sembarangan. *Kedua*, Ukuran Standar Kebijakan tidak diketahui dan tersampaikan dengan rinci kepada masyarakat. *Ketiga*, Pemahaman pelaksana kebijakan tidak memahami standar dan ukuran kebijakan. *Keempat*, Tingkat komitmen Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan Kebijakan tersebut. *Kelima*, Kondisi Sosial masyarakat di Desa Harus yang masih menggunakan jamban untuk BAB selain karena sarana WC belum merata. *Keenam*, Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah terbukti dengan masih banyaknya warga yang merasa tidak mampu untuk membuat WC dengan uang sendiri. *Ketujuh*, Kondisi Politik masyarakat masih menggunakan jamban karena bantuan WC belum merata. Faktor penghambat tidak ada sosialisasi secara khusus dan menyeluruh tentang isi kebijakan tersebut, Tingkat komitmen msyarakat yang rendah. Faktor Pendukung yaitu instansi terkait yang terus mendukung, adanya bantuan WC Sehat secara gratis.

Kata Kunci : Implementasi, Program, STBM

ABSTRACT

In order to fulfill public health, various programs have been implemented by the government, one of which is through the STBM program, however, in Harus Village, the implementation is still constrained by several things, so this study aims to find out about the implementation of the STBM Pillar 1 program on stopping open defecation in Harus Village, Amuntai Tengah District and the factors that influence it using qualitative descriptive research. The results of the study showed Less Good. It can be seen from the 7 less good indicators as follows: First, Clarity of Policy Objectives that are not known by the community regarding the contents of the policy standards on the STOP Open Defecation movement. Second, Policy Standard Measures are not known and conveyed in detail to the community. Third, Understanding of policy implementers does not understand the standards and measures of the policy. Fourth, Level of commitment Policy implementers who do not have a strong commitment in implementing the Policy. Fifth, Social Conditions of the community in Harus Village who still use toilets for defecation in addition to the fact that toilet facilities are not evenly distributed. Sixth, The low economic conditions of the community are evidenced by the fact that many residents still feel unable to make toilets with their own money. Seventh, Political Conditions of the community still use toilets because toilet assistance is not evenly distributed. Inhibiting factors are no specific and comprehensive socialization of the contents of the policy, Low level of community commitment. Supporting factors are related agencies that continue to support the policy implementation process, the provision of free Healthy Toilet assistance.

Keywords: Implementation, Program, STBM

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, sanitasi merupakan suatu hal yang amat penting maka penting bagi pemerintah untuk memberikan berbagai bentuk pelayanan publik dibidang kesehatan. Perlunya berbagai tindakan usaha dan pola hidup bersih, untuk mencegah berbagai sumber penyakit di lingkungan masyarakat, harus adanya program yang mendukung hal tersebut selain itu tidak lupa didukung dengan kesadaran diri yang tidak kalah penting.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan yang terbaik di masyarakat adalah melalui program kesehatan seperti STBM, dengan tujuan dan harapan dapat memutus rantai penularan penyakit di masyarakat, kotoran manusia identik dengan kuman, bakteri, virus hingga cacing. Apabila dibuang disembarang tempat akan memberi dampak buruk bagi lingkungan mulai dari penyebaran penyakit bahkan menjadi epidemik masyarakat yang luas

Sejatinya, program STBM ialah pendekatan dalam mengubah karakter perilaku kebersihan serta sanitasi lewat pemberdayaan warga melalui metode pemucuan. Dalam program ini mempunyai indikator yang berfungsi untuk mengukur perubahan yang terjadi, yaitu indikator hasil (*outcome*) serta keluaran (*output*). Indikator hasil STBM seperti: turunnya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan misalnya diare dan sebagainya yang berhubungan dengan sanitasi serta perilaku. Pembangunan sektor kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat maka program STBM ini diluncurkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan hidup di tengah lingkungan yang sehat salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah mensahkan peraturan terkait STOP BABS ini, mengingat masih banyaknya di lingkungan kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih belum terjamah dengan lingkungan yang sehat secara keseluruhan maka perlunya hal ini untuk menunjang lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari penyakit salah satunya adalah di desa Harus Kecamatan Amuntai, atas beberapa permasalahan yang ada seperti:

1. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih ada yang menggunakan jamban untuk buang air besar karena masih kurangnya ketegasan dari pemerintah dan sudah menjadi kebiasaan buruk masyarakat setempat di desa Harus Kecamatan Amuntai tengah, sehingga pelaku BABS masyarakat setempat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pada program. (*Sumber Data: Kantor Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah*)

2. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jamban setiap hari, tercatat ada sekitar 22 buah jamban pada Desa Muara Harus, hal ini terus terjadi karena masih belum adanya larangan yang tidak memperbolehkan mereka BAB sembarangan dan penerapan sanksi yang termasuk pada pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3 yang berbunyi : "Pada ayat (1) Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban umum dan/atau danau yang ditetapkannya sebagai Kawasan yang dilarang BABS". "Pada ayat (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Perobohan Teguran tertulis
 - c. Penghentian paksa kegiatan pembangunan; dan atau
 - d. bangunan tapa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun". (*Sumber Data: Masyarakat yang mempunyai jamban di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah*)
3. Masyarakat sudah diberikan fasilitas pembangunan jamban sehat, 1 Rumah mendapatkan Rp.1.500.000, Program ini merupakan program dari pemerintah daerah untuk mengubah perilaku kebiasaan BAB Sembarangan, namun mereka masih buang air besar sembarangan (BABS) aliran disungai. (*Sumber Data: Penerima Bantuan WC Sehat Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakuka penelitian dengan judul : “ **IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA HARUS KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** “

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive ampling* yang informan sebanyak 11 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Kejelasan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dari Gerakan Stop BABS kurang baik karena tidak diketahui secara keseluruhan dan rinci oleh pelaku kebijakan atau gerakan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk memberikan informasi mendalam tentang ukuran kebijakan secara terperinci.

b. Ukuran Standar Kebijakan

Ukuran standar kebijakan peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan kurang baik. Dilihat dari perilaku masyarakat yang masih terbiasa menggunakan jamban sehingga ukuran standar dari pelaksanaan Implementasi tentang Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan hanya beralih ke WC sehat. Maka perlunya dilakukan pembiasaan atau adaptasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan beralih ke WC sehat, dengan begitu dapat tercapainya suatu kebijakan agar kegiatan dapat dilakukan dan dijalankan sepenuhnya sesuai dengan standar dalam pelaksanaan Implementasi tentang Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

keadaan sumber daya manusia (petugas) cukup baik dan petugasnya sudah memadai, akan tetapi belum sesuai dengan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS. Dapat dilihat dari sumber daya manusia yaitu dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pemberdayaan masyarakat dengan adanya penyuluhan terkait dampak dari BAB sembarang untuk perubahan perilaku hidup sehat. Selain itu adapun pelibatan semua pihak baik dari dinas Kesehatan, Disperkim-LH, Dinas PU, dan instansi lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membentuk POKJA Sanitasi dengan melakukan perencanaan, seperti adanya pengupayaan agar masyarakat tidak lagi BAB sembarangan, pelaksanaan dengan adanya kegiatan bantuan program bantuan wc dengan melibatkan aparat desa dan ketua RT, dan adanya evaluasi oleh tim POKJA Sanitasi setiap 3 bulan sekali, dan dari petugas PAMSIMAS di desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah pun sudah melakukan pemantauan meskipun hanya berupa himbauan. Akan tetapi di desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah belum adanya penyampaian informasi mendalam oleh Dinas Kesehatan mengenai standar dan ukuran dari isi peraturan berupa Pengelolaan, pengetahuan, dan pembelajaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan sehingga masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isi Peraturan tentang Gerakan Stop BABS.

b. Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya non manusia (anggaran dana) sudah cukup baik, Karena anggaran dana desa khusus dianggarkan untuk pembangunan WC Sehat secara gratis kepada masyarakat yang belum memiliki WC Sehat. Hanya saja hal ini belum merata, Perlu anggaran dana desa dialokasikan dengan lebih banyak untuk pembangunan WC Sehat secara gratis agar dapat membantu dalam implementasi peraturan tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan dan berjalan dengan maksimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik dalam mendukung adanya kebijakan Stop BAB Sembarangan dan hal ini memicu keberhasilan dalam pelaksanaannya.

b. Kapasitas Organisasi

Kapasitas Organisasi dalam pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah sudah cukup baik, Setiap anggota yang terlibat sudah dilatih dan menguasai pada bidangnya masing-masing dan sudah sesuai dengan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS.

4. Sikap Kecendrungan (*Disposition*) Pelaksana

a. Pemahaman Pelaksana Mengenai Kebijakan

Pemahaman pelaksana kebijakan kurang baik, Karena Kebijakan Stop BAB Sembarangan ini merupakan usaha yang bagus dari pemerintah untuk menciptakan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersih dan bebas jamban tahun 2025, dan Kebijakan ini seharusnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran semua lapisan masyarakat untuk menggunakan WC sehat. Akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Harus kurang mengetahui lebih detail terkait gerakan ini, kerana selama ini yang ada hanya imbaun saja.

b. Tingkat Komitmen Pelaksana Kebijakan Terhadap Kebijakan

Tingkat Komitmen pelaksana Kebijakan Stop BAB Sembarangan kurang baik, Karena belum memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan Kebijakan ini, agar Kebijakan Stop BABS in dapat dijalankan dengan baik. Dilihat dari hasil kegiatan-kegiatan masyarakat di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah yang masih menggunakan jamban disungai untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan BAB tersebut meskipun sudah diberikan fasilitas WC sehat di rumah. Dengan berbagai alasan dari masyarakat menjadi bukti bahwa tidak adanya komitmen yang kuat dalam

mensukseskan penerapan peraturan daerah tentang Gerakan Stop BABS.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Dukungan Dari Instansi Lain

Dukungan instansi dari berbagai pihak cukup baik seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas turut mendukung dalam segi perubahan perilaku hidup sehat di Desa Harus Amuntai Tengah seperti pemucuan ataupun sosialisasi tentang larangan buang air besar sembarangan. Selain itu adanya partisipasi dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membantu pembiayaan untuk pembangunan WC sehat. Kemudian juga adanya dukungan dari Badan Pendapatan daerah (BAPEDA), Bagian Pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH).

b. Koordinasi dengan Instansi Lain

Koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana Gerakan Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan dengan Instansi lain cukup baik. Karena terlihat dengan adanya koordinasi dengan instansi lain yang tergabung dalam tim khusus Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA SANITASI) melakukan rapat dalam penyusunan strategi setiap 2 atau 3 bulan sekali terkait dengan adanya larangan buang air besar sembarangan. Selain itu juga adanya koordinasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan melakukan penyuluhan/pemucuan kepada masyarakat yang masih menggunakan jamban seperti dimasing-masing di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah terkait dengan upaya dalam perubahan perilaku hidup sehat agar tidak lagi menggunakan jamban dan tidak lagi buang air besar sembarangan ke sungai.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan masih kurang baik karena dilihat dari perilaku masyarakat di Desa Harus yang sebagian besar masyarakat masih menggunakan jamban untuk BAB selain karena sarana WC belum merata, sebagian besar masyarakat juga sudah merasa nyaman menggunakan jamban.

b. Kondisi Ekonomi

Kebijakan pelaksanaan Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan dari segi kondisi ekonomi kurang baik, dilihat dari adanya beberapa warga yang tidak punya cukup uang untuk membuat WC sendiri. Dari hal tersebut, maka kondisi ekonomi belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Stop Buang Air Besar

Sembarangan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan kebijakan. Karena sangat penting dalam suatu Kebijakan dengan baiknya kondisi perekonomian maka juga akan berdampak positif, namun jika kondisi ekonomi negatif atau kurang baik tentunya tidak akan mendukung baik dengan kelancaran Pelaksanaan program.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah kurang baik, Karena kebijakan Stop BABS ini tidak terlalu berdampak terhadap perilaku masyarakat meskipun sudah ada himbauan. Dapat dilihat sebagian besar di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah masih menggunakan jamban karena sarana WC yang belum merata sehingga masih berupa himbauan. Dari adanya kebijakan Peraturan Stop BABS ini memang masyarakatnya tidak dapat dipengaruhi dengan adanya himbauan saja karena masyarakat disana sudah terbiasa menggunakan jamban., dah juga masyarakat masih berpatokan dengan desa tetangga yang masih menggunakan jamban. Sehingga hal ini membuat kondisi politik dalam pelaksanaan Peraturan Stop Bung Air Besar Sembarangan menjadi terhambat, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan suatu Kebijakan.

Faktor Penghambat

a. Tidak ada sosialisasi secara khusus dan menyeluruh tentang kebijakan tersebut

Faktor penghambatnya adalah masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan belum mengetahui secara keseluruhan isi standar dari peraturan daerah dengan jelas dan lengkap dikarenakan tidak adanya pemberian informasi khusus dan mendalam tentang program ini kepada masyarakat.

b. Tingkat Komitmen masyarakat yang rendah

Faktor penghambat dalam Implementasi dalam kebijakan ini adalah para pelaksana kebijakan (masyarakat) belum bisa berkomitmen untuk berhenti menggunakan jamban dan Stop BAB Sembarangan karena tidak adanya pemahaman pelaksana tentang isi (Ukuran dan Tujuan) kebijakan Gerakan Stop BABS sehingga tidak adanya tindak lanjut pelaksana mendukung Gerakan Stop BAB Sembarangan secara rutin, Konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat dikatakan tingkat komitmen masih belum maksimal.

Faktor Pendukung

- a. Instansi Terkait Yang Terus Mendukung Dengan Baik Proses Implementasi Kebijakan

Disimpulkan bahwa dukungan dari instansi-instansi terkait sudah baik karena adanya dukungan dari instansi di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah yang mana adanya dukungan dalam perubahan perilaku ataupun pembiayaan untuk pembangunan WC sehat. Sehingga dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan Implementasi Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

- b. Adanya Bantuan WC Sehat Gratis

Sumber daya non manusia (anggaran dana) dalam pembiayaan pembangunan WC gratis sudah cukup baik, dilihat tidak ada kendala dalam pembiayaan karena anggaran dana desa memang khusus dianggarkan untuk pembangunan WC gratis kepada masyarakat yang belum memiliki WC sehingga sudah hampir merata, meskipun masih kurang mencukupi di karenakan penduduk yang banyak tidak mempunyai WC Sehat, serta dari anggaran dana desa juga digunakan untuk kegiatan lainnya sehingga pembangunan WC Sehat dilakukan secara bergiliran dan bertahap.

SIMPULAN

Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Tengah Kurang Baik. Dapat dilihat dari 7 indikator yang kurang baik sebagai berikut: *Pertama*, Kejelasan Tujuan Kebijakan yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai isi standar kebijakan tentang gerakan STOP BAB Sembarangan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk memberikan informasi mendalam tentang ukuran kebijakan secara terperinci.. *Kedua*, Ukuran Standar Kebijakan tidak diketahui dan tersampaikan dengan rinci kepada masyarakat, Ukuran standar juga tidak diketahui dengan baik oleh para pelaksana kebijakan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah, bahwa pelaksanaan Implementasi tentang Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan ini bertujuan agar masyarakat yang masih menggunakan jamban untuk merubah kebiasaan menggunakan WC sehat dan poin lainnya yang disebutkan dalam ketetapan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Ketiga*, Pemahaman pelaksana kebijakan tidak memahami standar dan ukuran kebijakan. Para pelaksana

yang terlibat tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga pelaksanaan kebijakan Stop BAB Sembarangan tidak dapat berjalan sesuai dengan mestinya. *Keempat*, Tingkat komitmen Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan Kebijakan tersebut dikarenakan tidak memahami mengenai tentang isi (Ukuran dan Tujuan) kebijakan Gerakan Stop BABS sehingga dapat dipastikan dengan tidak adanya komitmen yang kuat maka tujuan yang hendak dicapai dari Kebijakan program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga tidak dapat tercapai secara sempurna. *Kelima*, Kondisi Sosial masyarakat di Desa Harus yang masih menggunakan jamban untuk BAB selain karena sarana WC belum merata, sebagian besar masyarakat juga sudah merasa nyaman menggunakan jamban. *Keenam*, Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah terbukti dengan masih banyak nya warga yang merasa tidak mampu untuk membuat WC dengan uang sendiri. Dari hal tersebut, maka kondisi ekonomi belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan kebijakan. Karena sangat penting dalam suatu Kebijakan dengan baiknya kondisi perekonomian maka juga akan berdampak positif, namun jika kondisi ekonomi negatif atau kurang baik tentunya tidak akan mendukung baik dengan kelancaran Pelaksanaan Implementasi Peraturan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah. *Ketujuh*, Kondisi Politik masyarakat di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah masih menggunakan jamban karena bantuan WC belum merata sehingga larangan Stop BABS masih berupa himbauan, dah juga masyarakat masih berpatokan dengan desa tetangga yang masih menggunakan jamban. Sehingga hal ini membuat kondisi politik dalam pelaksanaan Peraturan Stop Bung Air Besar Sembarangan menjadi terhambat, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan suatu Kebijakan. Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah ada 2 faktor yaitu: *Pertama*, Tidak ada sosialisasi secara khusus dan menyeluruh tentang kebijakan tersebut, masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan belum mengetahui secara keseluruhan isi standar dari peraturan daerah dengan jelas dan lengkap dikarenakan tidak adanya pemberian informasi khusus dan mendalam tentang standar dan sasaran kebijakan Gerakan Stop BABS

dan tidak disosialisasikan secara khusus dan menyeluruh mengenai isi dari peraturan daerah (Ukuran dan Tujuan) berupa pengetahuan, pengelolaan dan pembelajaran sesuai dari ketetapan peraturan daerah sehingga tidak diketahui dengan jelas dan lengkap. *Kedua*, Tingkat komitmen masyarakat yang rendah, Para pelaksana kebijakan (masyarakat) belum bisa berkomitmen untuk berhenti menggunakan jamban dan Stop BAB Sembarangan karena tidak adanya pemahaman pelaksana tentang isi (Ukuran dan Tujuan) kebijakan Gerakan Stop BABS sehingga tidak adanya tindak lanjut pelaksana mendukung Gerakan Stop BAB Sembarangan secara rutin, Konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat dikatakan tingkat komitmen masih belum maksimal.

Maka dari itu disarankan :

1. Kepada Kepala Bidang Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas Kesehatan, Melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai isi dari perda secara terbuka dan menyeluruh. Selain itu juga perlunya sosialisasi dengan berbagai cara yang lain seperti pemasangan stiker, pamphlet, broser, spanduk, dan lain-lainnya sehingga dapat tertanam kesadaran dan pemahaman yang baik bahwa dari buang air besar sembarangan memiliki dampak yang negatif.
2. Kepada Kepala Desa, Perlunya perhatian khusus dari pemerintah dengan melakukan efek jera atau sanksi sesuai isi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada pasal 17 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3.
3. Kepada Masyarakat Desa Harus, Masyarakat Desa Harus Sadar bahwa Stop buang Air Besar Sembarangan Sudah dilarang sepenuhnya, WC Sehat juga sudah dibagikan, Perlu Kesadaran yang penuh terhadap lingkungan disekitar, karenapotensi terhadap penyakit begitu tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2009). Peraturan Bupati (PERBUP) No.06 Tahun 2021 *Tentang Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara*
- Anonim, (2009). *Undang – Undang Tentang Kualitas Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009*
- Agustiar, Yerni. 2015. *Kualitas Pelyanan Pembuatan Papor di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin.Tesis Pascasarjana pada Universitas Lambung Mangkurat*
- Harbani Pasolong.2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Serta Implementasinya*,
- Hutasoit, CS. 2000. *Pelayanan Publik Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Magnascript



- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Bandung: Cv Mandar Maju
- Riduan, Akhmad. 2013. *Administrasi Publik*, Banjarmasin: Pustaka Banua
- Rusnadi, 2014. *Kualitas Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) di Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Tesis Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
- Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Cv Pusaka Setia.
- .